

## RINGKASAN

Didalam penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dalam arti mengkaji peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keberadaan hak pengelolaan dalam hubungannya dengan hak atas tanah, khususnya HGB yang diberikan diatas tanah hak pengelolaa pelabuhan dan merupakan salah satu upaya untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang benar mengenai HGB diatas tanah hak pengelolaan pelabuhan jangan sampai pemegang hak pengelolaa pelabuhan merasa dirugikan.

Melalui penelitian ini diharapkan yang akan datang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi pemegang Sertifikat HGB diatas tanah hak pengelolaan pelabuhan.

Hasil penelitian dapat mewujudkan salah satu bentuk penelitian hukum sehingga mampu memantapkan dan mengamankan hasil pembangunan dan mudah-mudahan didalam penulisan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan Rancangan Undang-undang dibidang Pertanahan.

Bahwa hak pengelolaan setelah dikaji secara yuridis kedudukan hukumnya semakin kuat yang diperjelaskan didalam UU. Nomor : 16 tahun 1985 tentang Runah Susun pasal 7.

Pemegang Sertipikat HGB diaatas tanah HPLP yang melakukan wanprestasi bahwa tanah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada pemegang hak pengelolaan sejalan PPRI Nomor : 40 tahun 1996 pasal 38